

Pengembangan Disain Manajemen untuk Efektifitas Implementasi Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Daerah Perbatasan Propinsi Kalimantan Timur dan Utara

Vandalita M.M Rambitan^{1*}, Aloysius Hardoko²

¹Program Studi Magister Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Mulawarman

²Fakultas Pendidikan dan Keguruan PKn Universitas Mulawarman

*Corresponding email: vandalitamr@gmail.com

Abstract: Kendala yang dihadapi terjadi baik dari tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan dengan muara utamanya adalah terkait manajemen pengelolaan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum tertata dengan benar ditingkat pemerintah kabupaten yang masuk dalam kategori daerah terpencil, terluar, terdepan (3T) pada umumnya berada di wilayah perbatasan propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Mengingat pentingnya dukungan pemerintah kabupaten dalam keikutsertaan sebagai bagian dari pengelolaan pendidikan profesi guru dalam rangka menyiapkan guru masa depan Indonesia, maka dalam pengeloannya dibutuhkan suatu perencanaan yang matang sehingga sub sistem pengelolaan pendidikan profesi guru (PPG) yang terjadi di tingkat kabupaten benar-benar berjalan sebagai bagian dari persiapan pendidikan profesi guru PPG secara nasional. Melalui penelitian ini mengembangkan disain manajemen pendidikan profesi guru yang terfokus di daerah terpencil, terluar, terdepan (3T) untuk kabupaten Nunukan, dan Kutai Barat yang berada dalam wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Metode penelitian adalah penelitian pengembangan yang diawali dengan kegiatan analisis kebutuhan untuk tahun pertama. Tahun ke dua adalah pengembangan draf disain manajemen melalui validasi ahli dan validasi empiris, sehingga dari draf disain manajemen menjadi disain manajemen. Tahun ke tiga penelitian ini adalah sosialisasi hasil pengembangan disain manajemen dengan teknik simulasi. Keseluruhan penelitian di rencanakan 3 tahun dan yang dilaporkan dalam makalah ini hasil tahun pertama karena penelitian baru memasuki tahun pertama. Teknik analisis data menggunakan tabulasi dan diinterpretasi. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang dihadapi selama ini terkait program PPG adalah kurangnya koordinasi antara pusat, dan dinas pendidikan dari tahap persiapan penyusunan program dan implementasi program sampai pada kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini berdampak pada upaya yang dilakukan oleh dinas setempat menjadi tidak efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan. Salah satu indikasi tidak efektif dalam pemecahan masalah terkait implementasi program PPG adalah kompetensi peserta PPG tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, masalah ini terjadi karena dinas pendidikan tidak dilibatkan pada tahapan persiapan yang dilaksanakan oleh pengelola PPG ditingkat pusat.

Keywords: disain manajemen, pendidikan profesi guru, wilayah perbatasan

1. PENDAHULUAN

Di Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki demografi sangat dinamis ini, kebijakan nasional bidang pendidikan harus dirumuskan secara hati-hati. Kondisi geografis-ekonomis yang beragam, dengan semangat otonomi daerah yang saat ini semakin progresif, menyebabkan pemerataan akses dan mutu pendidikan belum berjalan sebagaimana seharusnya, termasuk kesenjangan ketersediaan dan kualitas guru. Untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan akses serta mutu pendidikan bagi seluruh warga Negara, diperlukan suatu sistem pendidikan calon guru yang kuat dan lentur sesuai dengan kebutuhan nasional dan daerah. Ini merupakan kebijakan nasional yang harus segera diambil untuk menjamin ketersediaan perangkat untuk menerobos sekat fanatisme daerah dan memastikan tidak ada daerah yang tertinggal di bidang pendidikan.

Agar menjamin efisiensi dan mutu pendidikan ke depan, harus terjadi transformasi model persiapan guru di perguruan tinggi dari *bleeding-supply* menuju

demand-driven, sesuai dengan perencanaan kebutuhan guru. Pergeseran ini akan menempatkan Ditjen Dikti beserta perguruan tinggi LPTK, yang semula memiliki otonomi penuh, menjadi subsistem dan bagian integral dari sistem keguruan nasional. Kuota mahasiswa calon guru harus dibatasi dan segera ditetapkan secara nasional, demikian pula kriteria atau kualitas masuknya. Ditjen dikti sangat mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi LPTK dan institusi yang memiliki otoritas untuk melakukan perencanaan kebutuhan guru dan institusi pengguna lulusan.

Jumlah LPTK yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir merupakan data penting yang harus segera di evaluasi. Secara nasional terdapat 1,2 juta mahasiswa calon guru yang kini terdaftar di hampir 400 LPTK negeri dan swasta. Jumlah ini jauh melebihi perkiraan kebutuhan guru akibat pensiun yang rata-rata sekitar 40.000 orang per tahun. Sekalipun demikian pada bidang-bidang tertentu masih terjadi kelangkaan guru di berbagai daerah. Kesenjangan antara program di LPTK dan kebutuhan



guru untuk menjamin pemerataan dan perluasan akses serta mutu pendidikan harus segera diatasi Tilaar, (2000)

Wilayah Indonesia yang demikian besar, sistem pendidikan calon guru harus mampu menyediakan solusi terhadap kompleksitas persoalan pendidikan seperti distribusi, ketaksesuaian bidang ilmu dengan tugas mengajar, tidak optimalnya tugas dan ketersediaan guru diseluruh penjuru tanah air. Sistem ini harus bersifat luwes dan lentur dengan berbagai pilihan yang memadukan sistem tertutup dan terbuka atau kom,binasi diantara keduanya yang kemudian dikenal dengan sistem terintegrasi, berlapis, dan pola boratif (hybrid). Demografi Indonesia yang bergerak dinamis juga memberikan inspirasi bahwa sistem pendidikan calon guru harus menyediakan pilihan-pilihan agar peran dan tugas guru bisa difungsikan secara optimal mengingat mereka adalah pembelajar yang baik.

Beberapa program rintisan dan terobosan untuk menyiapkan calon guru masa depan sebagaimana amanat Undang-Undang telah dimulai. Targetnya pada tahun 2015 kemendikbud telah memiliki dan siap melaksanakan program pendidikan profesi guru untuk calon guru secara nasional, sehingga persis setelah 10 tahun Undang-Undang RI No.14 tahun 2005 diterbitkan yaitu pada tahun 2016, guru-guru yang diangkat adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan guru yang khas ini kemendikbud (2015).

Beberapa rintisan dan terobosan yang terangkum di dalam program maju bersama mencerdaskan Indonesia (MBMI) ini diberi judul menyiapkan guru masa depan. Program ini berhasil menyalurkan konsep pemikiran akademis yang memadukan teori modern dan kearifan local dalam hal pendidikan calon guru. Disamping itu, program ini juga memaparkan contoh implementasi terbaik dari hasil uji coba dalam 3 tahun terakhir, termasuk memberikan berbagai rekomendasi kebijakan yang harus direspons oleh pemerintah agar program dan target waktu dapat dipenuhi.

Program pendidikan yang diluncurkan terkait penyiapan guru masa depan adalah Pendidikan profesi guru (PPG). Program ini harus merujuk kepada perkembangan pendidikan terkini dan jati diri bangsa, serta memiliki kelenturan untuk memecahkan persoalan nasional dibidang pendidikan. Terobosan baru untuk membangun sosok guru yang tangguh dan peduli kepada bangsa dan Negara melalui program SM3T (Sarjan Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal). Pengalaman langsung di daerah-daerah khusus di Indonesia akan membuka matahati dan nurani, untuk paham, peka dan peduli terhadap nasib bangsa.

Itulah sebabnya, program SM3T dirancang secara serius untuk membekali pengalaman serupa bagi calon guru masa depan sebagai bagian tak terpisahkan dari program PPG secara keseluruhan. PPG tidak hanya diartikan sebagai proses pendidikan dalam arti sempit (*schooling and training*), tetapi sebagai suatu proses pemerdayaan dan pembudayaan generasi muda menjadi guru terdidik dan berbudaya indonesia (*educated and indonesialized teacher*).

Tanpa identitas jelas sebagai suatu bangsa, Indonesia akan mudah tergilas oleh suatu arus globalisasi yang selanjutnya mudah terpuruk ke dalam bangsa yang tanpa bentuk (identitas) (Tilaar, 2000). Sebuah ironi yang memilukan bila para guru tidak mengenal dan mencintai persoalan bangsa. Kepribadian guru merupakan hasil pembentukan pengalaman belajar yang bukan hanya terjadi dalam proses pembelajaran secara langsung tetapi terintegrasi dari dampak ikutan (*nuturant effect*) kegiatan pembelajaran dan pengalaman-pengalaman panjang sebelumnya.

Hasil kajian terhadap program SM3T beserta sejumlah kesaksian peserta, murid, masyarakat dan pemerintah daerah selama dua tahun terakhir, menunjukkan bahwa secara akademik, penugasan calon guru untuk bertugas di daerah tersebut mampu meningkatkan kompetensi calon guru, di samping juga sangat membantu daerah memenuhi akses pendidikan. Program SM3T bukan hanya berfungsi sbagai wahana untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah, tetapi juga menjadi wahana bagi calon guru menggembleng karakternya sehingga kelak akan menjadi sosok guru Indonesia yang mennyayangi murid-muridnya dan peduli kepada bangsanya. Program ini mengarahkan calon guru untuk bisa memahami indonesia secara benar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga calon guru wajib bertugas di daerah 3T dapat diadopsi secara nasional sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Jika penugasan calon guru di daerah 3T diakui sebagai bentuk induksi CPNS, maka wajib bertugas didaerah 3T akan memperoleh banyak dukungan dari berbagai pihak. Pihak yang terlibat dalam rangka pelaksanaan SM3T adalah kabupaten-kabupaten yang beada di wilayah terpencil, terluar dan terdepan (3T).

Di Kalimantan ada 3 propinsi yang menjadi tempat sasaran Program SM3T dan penempatan guru di daerah 3T yakni propinsi kalimantan Timur, propinsi kalimantan utara, dan propinsi kalimantan barat. Salah satu permasalahannya adalah terkait kesiapan dinas-dinas pendidikan daerah-daerah perbatasan untuk melaksanakan program pendidikan profesi guru yang masih menemui kendala. Kendala yang dihadapi terjadi baik dari tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan yang muara utamanya adalah terkait manajemen pengelolaan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum tertata dengan benar ditingkat pemerintah kabupaten yang masuk dalam kategori daerah terpencil, terluar, terdepan (3T).

Mengingat pentingnya dukungan pemerintah kabupaten dalam keikutsertaan sebagai bagian dari pengelolaan pendidikan profesi guru dalam rangka menyiapkan guru masa depan indonesia, maka dalam pengeloannya dibutuhkan suatu perencanaan yang matang sehingga sub sistem pengelolaan pendidikan profesi guru (PPG) yang terjadi di tingkat kabupaten benar-benar berjalan sebagai bagian dari penyiapan pendidikan profesi guru secara nasional. Melalui penelitian ini mengembangkan disain manajemen pendidikan profesi guru yang terfokus di daerah

terpencil, terluar, terdepan (3T) untuk kabupaten Nunukan, dan Kutai Barat yang berada dalam wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Penelitian direncanakan dijalankan selama tiga tahun, untuk itulah maka permasalahan penelitian setiap tahun berbeda namun tetap memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan akhir yakni disain manajemen untuk implementasi program pendidikan profesi guru (PPG) di daerah terpencil, terluar, terdepan (3T) yang pada umumnya daerah tersebut berada di wilayah perbatasan. Makalah ini akan melaporkan hasil penelitian terkait permasalahan tahun pertama yang merupakan tahapan analisis kebutuhan dalam pengembangan disain manajemen untuk implementasi program PPG.

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T) wilayah propinsi Kalimantan Utara dan Timur dalam mengimplementasikan program pendidikan profesi guru (PPG)? (tahun 1)
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T) wilayah propinsi Kalimantan Utara dan Timur dalam mengimplementasikan program pendidikan profesi guru (PPG)? (tahun 1)
3. Disain manajemen bagaimana yang perlu dikembangkan dalam upaya mengefektifkan implementasi program pendidikan profesi guru (PPG) oleh pemerintah kabupaten di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T) wilayah propinsi Kalimantan Utara dan Timur? (tahun ke 2 dan ke 3)

Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T) wilayah propinsi Kalimantan Utara dan Timur dalam mengimplementasikan program pendidikan profesi guru (PPG). (tahun 1)
2. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T) wilayah propinsi Kalimantan Utara dan Timur dalam mengimplementasikan program pendidikan profesi guru (PPG). (tahun 1)

Mengembangkan disain manajemen dalam upaya mengefektifkan implementasi program pendidikan profesi guru (PPG) oleh pemerintah kabupaten di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T) wilayah propinsi Kalimantan Utara dan Timur. (tahun 2 dan 3)

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan atas fakta-fakta dan memberikan interpretasi atau pemaknaan atas fakta-fakta tersebut (Sugiyono, 2009). Dalam implementasi penelitian menggunakan teknik wawancara dan *focus group discussion* (FGD)

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan, mulai dari Februari- November 2015, di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi penelitian ini adalah Guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, UPT, peserta program SM3T, di kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, dan peserta setelah program SM3T dan sementara mengikuti PPG di FKIP Universitas Mulawarman.

Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah Guru dan Kepala sekolah, dinas pendidikan, UPT, peserta SM3T, dan peserta setelah selesai program SM3T, pengelola program PPG, yang di tetapkan secara *purposive sampling* sehingga jumlah sampel di kabupaten Nunukan dan kabupaten Kutai Barat, dan Samarinda sebanyak 52 orang yang terdiri dari 2 orang UPT dan 10 orang peserta SM3T, 5 orang dinas pendidikan, 10 orang kepala sekolah, 9 orang guru dan 15 orang peserta program PPG serta yang telah selesai melaksanakan program SM3T di FKIP Universitas Mulawarman, serta 1 orang pengelola program PPG. Indikator Terkait Fokus Permasalahan Penelitian yakni persiapan dan pelaksanaan program pendidikan profesi guru (PPG). Adapun indikator terkait fokus permasalahan penelitian untuk tahun pertama penelitian ini sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini;

Tabel 1. Sosialisasi Program Dan Koordinasi Tahapan Seleksi Persiapan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Di Kabupaten Nunukan Dan Kabupaten Kutai Barat

No	Aspek Penilaian
1	Sosialisasi program
2	Seleksi administrasi
3	Pendaftaran online
4	Seleksi tertulis seleksi wawancara
5	Penetapan jumlah peserta



Tabel 2. Koordinasi pada Tahap Persiapan Program PPG di Kab.Nunukan dan Kab.Kutai Barat

No	Aspek Penilaian
1	koordinasi saat persiapan penyusunan program
2	koordinasi saat penyusunan program
3	koordinasi setelah selesai penyusunan program

Tabel 3. Permasalahan Terkait Pelaksanaan Program PPG di Kab.Nunukan dan Kab.Kutai Barat

No	Aspek Penilaian
1	Kesesuaian kompetensi peserta dengan kebutuhan daerah.
2	Kemampuan peserta memecahkan permasalahan daerah.
3	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta terkait kompetensi.

Tabel 4. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program PPG di Kab.Nunukan dan Kab.Kutai Barat

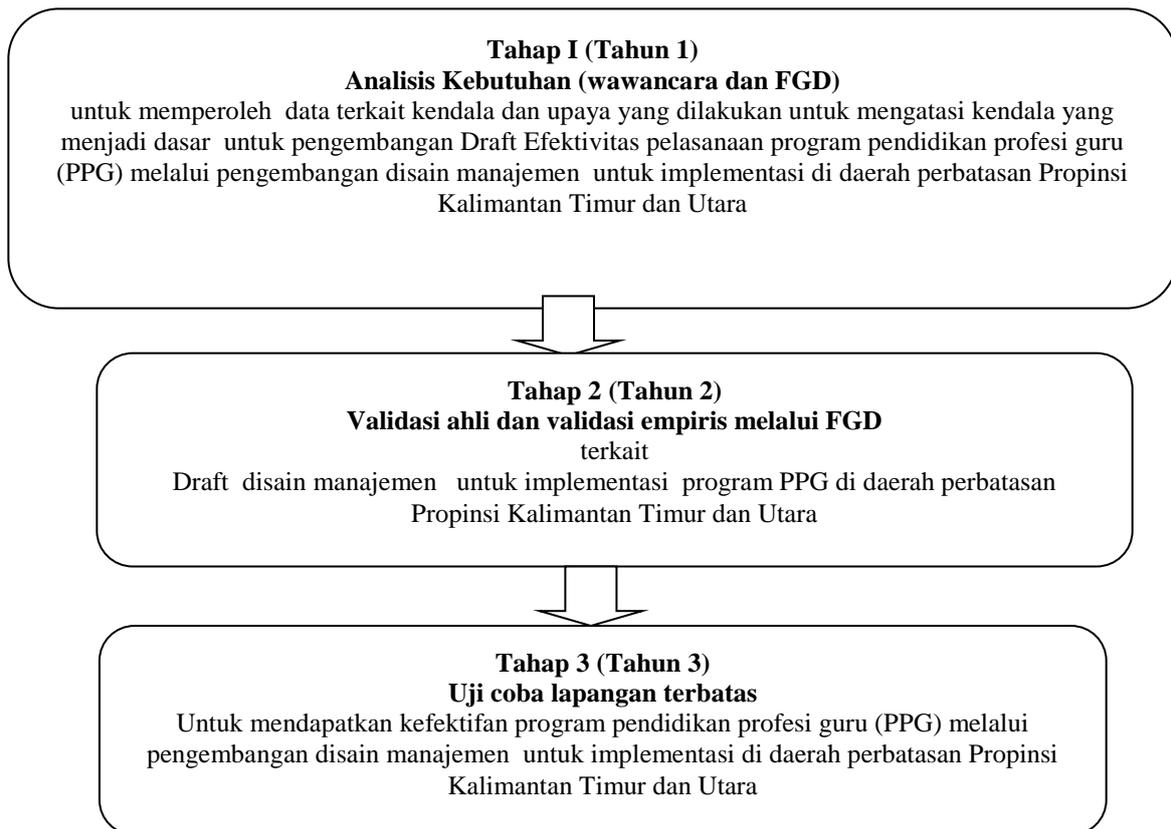
No	Aspek Penilaian
1	Koordinasi sebelum melaksanakan monitoring dan evaluasi
2	Kordinasi saat terjadinya monitoring dan evaluasi
3	Kordinasi setelah terjadi kegiatan monitoring dan evaluasi

Tabel 5. Upaya Mengatasi Permasalahan Oleh Dinas Kabupaten Nunukan dan Kutai Barat.

No	Tahap Pelaksanaan
1	Persiapan program PPG
2	Pelaksanaan program PPG

Prosedur Penelitian

Penelitian efektivitas pelaksanaan program pendidikan profesi guru (PPG) melalui pengembangan disain manajemen untuk implementasi di daerah perbatasan Propinsi Kalimantan Timur dan Utara melalui beberapa proses pengembangan seperti analisis kebutuhan, validasi ahli dan uji coba lapangan terbatas serta tahap eksperimen. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam bagan berikut.



Gambar 1. Bagan alur penelitian efektivitas pelaksanaan program pendidikan profesi guru (ppg) melalui pengembangan disain manajemen untuk implementasi di daerah perbatasan propinsi kalimantan timur dan utara

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada dua kabupaten yang terletak di

wilayah perbatasan yaitu: kabupaten Nunukan dan Kabupaten Kutai Barat dan peserta program PPG setelah selesai melaksanakan SM3T di FKIP Universitas mulawarman diperoleh hasil penelitian seperti yang tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Sosialisasi Program dan Koordinasi Tahapan Seleksi Persiapan Program PPG di Kab.Nunukan dan Kabupaten Kutai Barat

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				Sangat Baik
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	
1	Sosialisasi Program	64%	17%	11%	5%	
2	Seleksi Administrasi	70%	11%	5%	5%	
3	Pendaftaran Online	58%	23%	11%	5%	
4	Seleksi Tertulis Seleksi Wawancara	64%	17%	5%	11%	
5	Penetapan Jumlah Peserta	58%	29%	5%	5%	

Tabel 7. Koordinasi pada Tahap Persiapan Program PPG di Kab.Nunukan dan Kab.Kutai Barat.

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				Sangat baik
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	
1	Koordinasi saat persiapan penyusunan program	58%	23%	11%	5%	
2	Koordinasi saat penyusunan program	64%	17%	5%	11%	
3	Koordinasi setelah program tersusun	58%	29%	5%	5%	

Tabel 8. Permasalahan Terkait Pelaksanaan Program PPG di Kab.Nunukan dan Kab.Kutai Barat.

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				Sangat Baik
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	
1	Kesesuaian Kompetensi Peserta Dengan Kebutuhan Daerah.	64%	17%	11%	5%	
2	Kemampuan Peserta Memecahkan Permasalahan Daerah.	70%	11%	5%	5%	
3	Meningkatkan Kemampuan Dan Ketrampilan Peserta Terkait Kompetensi.	58%	23%	11%	5%	

Tabel 9. Koordinasi pada Saat Pelaksanaan Program Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPG di Kab.Nunukan dan Kab.Kutai Barat.

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				Sangat Baik
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	
1	Koordinasi Antar Lembaga Sebelum Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi	70%	11%	5%	5%	
2	Kordinasi Antar Lembaga Pada Saat Terjadinya Monitoring Dan Evaluasi	58%	23%	11%	5%	
3	Kordinasi Antar Lembaga Setelah Terjadi Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi	64%	17%	5%	11%	

Tabel 10 Upaya Mengatasi Permasalahan yang Dilakukan Dinas Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Kutai Barat

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				Sangat Baik
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	
1	Persiapan program PPG	70%	11%	5%	5%	
2	Pelaksanaan program PPG	58%	23%	11%	5%	



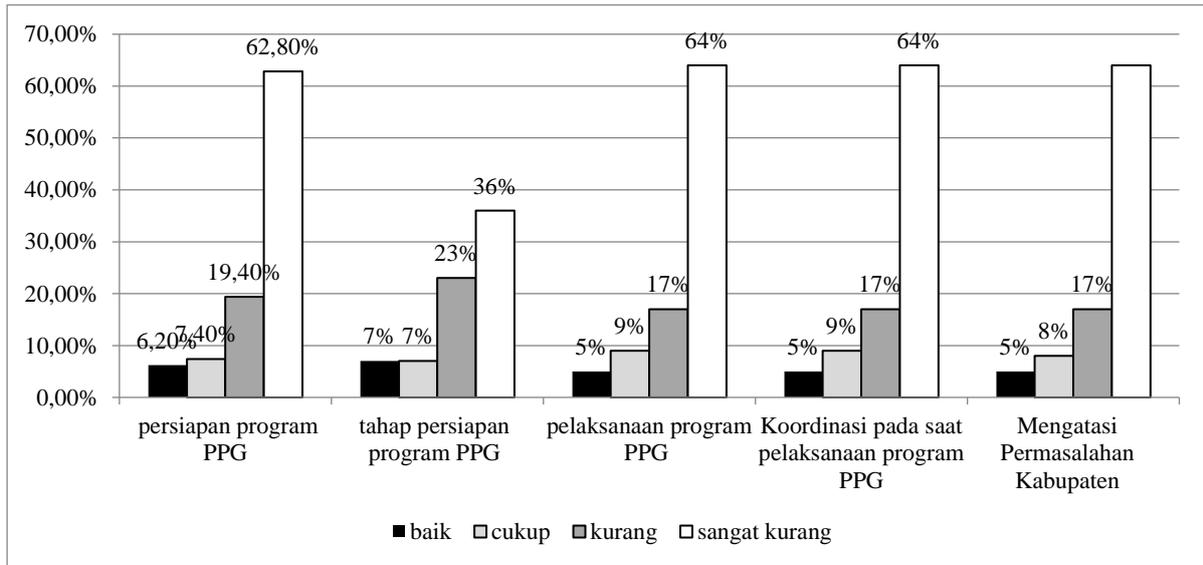


Diagram 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Terkait Fokus Permasalahan Penelitian Untuk Guru Dan Kepala Sekolah Di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara

4. PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait permasalahan persiapan pendidikan profesi guru (PPG), dengan fokus persiapan penyusunan program, saat penyusunan program, setelah penyusunan program seperti pada tabel 6, menunjukkan bahwa sebagian besar dinas pendidikan menyampaikan bahwa sangat kurang (70%) pengelola program PPG pusat melaksanakan sosialisasi dan berkoordinasi baik pada saat persiapan penyusunan program, saat penyusunan program, dan setelah penyusunan program. Diakui bahwa dinas setempat mengetahui program PPG setelah program PPG selesai dirancang oleh pengelola ditingkat pusat.

Pemahaman yang baik oleh pihak terkait mengenai persiapan program PPG misalnya tentang karakteristik daerah sasaran sangatlah penting, sebelum peserta diterjunkan ke lapangan. Misalnya berapa jumlah peserta perempuan dan berapa jumlah peserta laki-laki. Wilayah perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kebanyakan adalah harus menempuh perjalanan dengan moda transportasi sungai, laut dan darat, sehingga memerlukan waktu yang lama dan kesiapan mental yang baik bagi peserta program PPG. Tentunya hal ini akan membawa risiko yang tinggi kepada peserta program PPG. Apalagi dengan tidak adanya koordinasi yang baik, maka hal ini akan menjadi permasalahan serius bagi dinas pendidikan setempat, LPTK pengelola program dan secara khusus bagi peserta program PPG dan pada akhirnya bermasalah pada saat mereka melaksanakan program PPG di daerah.

Hasil penelitian tabel 7, (64%) sangat kurang terkait permasalahan persiapan pendidikan profesi guru (PPG), ternyata terjadi juga pada beberapa hal yakni sosialisasi program, seleksi administrasi, pendaftaran online, seleksi online dan wawancara. Dinas pendidikan menyampaikan bahwa kurang atau bahkan tidak terjadi sosialisasi program sebelum

diadakan seleksi peserta. Demikian halnya dengan pelaksanaan seleksi dari tahapan pendaftaran, seleksi administrasi, tes online, dan wawancara, dinas belum dilibatkan dan tidak atau belum ada koordinasi. Pada tahapan persiapan ini terutama unit pengelola teknis (UPT) dan dinas pendidikan menyampaikan bahwa pada tahapan persiapan mereka tidak mendapatkan penyampaian dari pengelola pusat, yang terjadi adalah mereka diundang ke Jakarta pada saat setelah peserta PPG sudah ditetapkan. Dampak dari kondisi ini adalah pada saat peserta program PPG sudah tiba di daerah mereka, barulah terjadi pembagian untuk lokasi tugas, akibatnya penempatan peserta tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi daerah tersebut.

Terkait persiapan pada saat pendaftaran sampai penentuan jumlah peserta dinas pendidikan daerah tidak dilibatkan, instansi yang terlibat adalah pengelola program PPG di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK). Akibat dari hal ini adalah daerah akan mengikuti program pusat, padahal program tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan untuk permasalahan pembangunan pada umumnya dan permasalahan pendidikan pada khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Selama ini yang terjadi adalah setelah penetapan kelulusan peserta, kemudian lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) dan dinas-dinas pendidikan daerah terkait akan diundang untuk negosiasi jumlah dan tempat yang menjadi sasaran implementasi program PPG. Hal utama yang dibicarakan adalah penempatan peserta berdasarkan jumlah dan daerah sasaran, tetapi tidak pernah membicarakan tentang karakteristik kebutuhan daerah sasaran. Jika hal ini terjadi maka satu hal yang akan menjadi masalah adalah ketidak siapan dinas dan peserta untuk melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah sasaran.

Salah satu contoh yang terjadi adalah dinas pendidikan daerah sasaran akan menempatkan peserta perempuan di desa-desa yang mudah dijangkau, dan peserta laki-laki di tempatkan di desa-desa yang sulit dijangkau. Pengalaman yang terjadi selama ini peserta program PPG komposisi antara perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda, sama, atau bahkan lebih banyak perempuan. Kondisi ini tentunya akan menyulitkan dinas pendidikan daerah setempat dalam pendistribusian peserta ke desa-desa. Akibatnya tidak meratanya layanan peseserta kepada desa-desa yang membutuhkan.

Kondisi ini akan mengakibatkan permasalahan pada ketidak tercapaian kompetensi peserta program PPG, dan juga ketidak tuntasannya permasalahan khususnya pendidikan di daerah sasaran dalam hal ini daerah perbatasan. Permasalahan daerah perbatasan berbeda dengan daerah terpencil. Permasalahan daerah perbatasan, yang paling mendasar adalah mereka merasakan ketimpangan pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta sarana lainnya yang jika dibandingkan dengan negara tetangga akan membuat mereka lebih tertarik dengan negara tetangga. Tentunya permasalahan ini akan terpecahkan jika terjadi koordinasi antar lembaga, sehingga jika permasalahan ini dibebankan pada peserta program PPG maka dapat dipastikan permasalahan daerah perbatasan tersebut tidak dapat dipecahkan.

Program pendidikan profesi guru merupakan bagian dari manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Rue & Byars (2000) adalah: "*Management is a form of work that involves coordinating an organization's resources-land, labour, and capital to accomplish organizational objectives*". Sebuah bentuk manajemen yang melibatkan koordinasi wilayah sumber daya organisasi, tenaga kerja, dan modal merupakan sasaran pemenuhan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya Hasibuan, M. S (2003) juga mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian jika tanpa koordinasi maka tujuan tidak tercapai.

Permasalahan lain yang terjadi adalah dinas pendidikan daerah sasaran, tidak memasukkan program pendidikan profesi guru (PPG) dalam rencana anggaran biaya (RAB), sehingga ada dinas yang tidak hadir saat terjadi koordinasi ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yakni pada saat pengelola program pendidikan profesi guru (PPG) di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) mengundang untuk menjadi narasumber pada saat tahapan prakondisi untuk program sarjana mendidik daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T), yang merupakan bagian dari program pendidikan profesi guru (PPG). Hal ini terjadi karena pada saat penyusunan program dinas pendidikan daerah sasaran tidak dilibatkan.

Permasalahan ini berdampak juga sampai pada tingkat unit pengelola teknis (UPT) yang levelnya berada di bawah dinas pendidikan, mereka merasakan bahwa kurang sekali dinas pendidikan ditingkat kabupaten mengadakan koordinasi dengan unit ini.

Biasanya unit pelaksana teknis (UPT), tinggal melaksanakan karena peserta sudah ditentukan lokasinya oleh dinas pendidikan ditingkat kabupaten. Padahal jika dibandingkan dengan dinas pendidikan ditingkat kabupaten, maka unit pengelola teknis (UPT) dinas pendidikan lebih memahami kebutuhan daerah karena mereka berada di lokasi tempat peserta di tempatkan.

Kepala sekolah menyampaikan biasanya dinas berkoordinasi dengan mereka saat pembagian lokasi peserta. Artinya mereka datang untuk mengetahui bahwa di sekolah mereka ada peserta program PPG. Kepala sekolah juga sebagian besar mengungkapkan bahwa dinas pendidikan meminta daftar kebutuhan guru dari sekolah-sekolah, akan tetapi peserta yang bertugas di sekolah sebagian besar tidak sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Akibatnya kepala sekolah merasa terbebani, karena guru yang ada saja sudah berlebih ataupun sudah cukup, malah ditambah lagi dengan masalah baru untuk memikirkan bagaimana peserta tersebut sehingga bisa menjalankan program SM3T atau program PPG lainnya.

Hasil penelitian terkait pelaksanaan program pendidikan profesi guru (PPG) dengan indikator kesesuaian kompetensi peserta dengan kebutuhan daerah, keterampilan peserta memecahkan permasalahan daerah, peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta seperti ditunjukkan pada tabel 8, diperoleh bahwa kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan daerah dibawah 50%. Artinya bahwa dilihat dari kualifikasi akademik, dalam hal ini kesesuaian bidang studi yang dibutuhkan oleh daerah dengan peserta masih bermasalah. Hal ini terjadi misalnya karena peserta yang ditempatkan di daerah yang membutuhkan tenaga pengajar bidang studi matematika, ternyata peserta yang ditempatkan di daerah tersebut berlatar belakang bahasa inggris.

Kondisi di atas akan mengakibatkan permasalahan pada pencapaian kompetensi peserta dengan pemecahan permasalahan di daerah 3T. Permasalahan pencapaian kompetensi peserta akan terjadi karena kompetensi yang dimiliki peserta tidak sesuai dengan permasalahan kompetensi pembelajaran yang terjadi di sekolah. Khusus bagi peserta yang mendapat tugas mengabdikan di tingkat SMP dan SMA, tentunya hal ini bermasalah, karena dalam kondisi yang serba terbatas terkait akses internet maka akan mendapatkan kesulitan menemukan referensi, sementara kompetensi yang sudah ada pada peserta tersebut tidak digunakan akibatnya program ini tidak menunjang kemampuan dan keterampilan peserta. Salah satu contoh permasalahan ini adalah semestinya setelah selesai mengikuti program SM3T yang merupakan bagian dari program PPG, pada saat menempuh uji kompetensi maka mereka tidak akan mengalami kendala seperti tidak lulus. Namun yang terjadi selama ini masih banyak peserta yang tidak lulus.

Kompetensi kepribadian misalnya keuletan, tahan banting, dan ketahanan dalam situasi sulit terjadi permasalahan, karena kebanyakan peserta SM3T oleh dinas ditempatkan di lokasi-lokasi yang sebenarnya



tidak memenuhi kriteria lokasi 3T. Hal ini diakui oleh peserta bahwa lokasi yang mereka tempati sama dengan daerahnya atau bahkan lebih maju dari daerahnya, sehingga mereka merasakan kesulitan beradaptasi baik dari segi akademik maupun non akademik. Mereka bahkan mengungkapkan bahwa sebenarnya pada saat pra kondisi sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkarya di daerah 3T namun hal tersebut ternyata tidak tergunakan setelah mereka ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai.

Terkait permasalahan kemampuan memecahkan permasalahan daerah tentunya hal ini masih berada pada kategori kurang karena kebanyakan peserta baik peserta yang sementara mengikuti program SM3T maupun yang telah selesai mengikuti program SM3T dan sementara mengikuti program PPG pasca SM3T di FKIP universitas mulawarman, merasa bahwa mereka ditempatkan pada lokasi yang tidak sesuai dengan karakteristik 3 T oleh dinas pendidikan setempat. Selain masalah pada ketidaksesuaian kompetensi, masalah lainnya adalah pada lokasi yang sebenarnya harus mendapatkan peserta karena memenuhi kriteria 3 T ternyata tidak memperoleh peserta. Akibatnya masalah yang dialami oleh daerah 3 T tersebut tidak pernah dapat di pecahkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Noe (2003), bahwa pengelolaan manajemen yang baik akan memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan bersama. Manajemen sumber daya manusia akan berhasil dengan baik dan berguna dalam pencapaian tujuan organisasi, bila dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Dampak yang dapat dirasakan bila sistem manajemen dilakukan dan dikelola secara baik akan meningkatkan pendapatan organisasi dan tentunya akan meningkatkan kegiatan operasional organisasi. Dengan demikian jika pengelolaan manajemen program tidak baik maka tujuan program tidak tercapai.

Salah satu pemicu permasalahan ini, sehingga dinas tidak mengalokasikan anggaran program PPG dalam rencana anggaran biaya (RAB). Kondisi daerah dan lokasi di daerah memenuhi kriteria 3 T yang ada di Kalimantan Timur dan Utara, harus ditempuh dengan berbagai moda transportasi dan memakan waktu yang lama. Modal transportasi yang digunakan biasanya darat, sungai, udara. Tentunya jika dinas berkoordinasi dengan kepala sekolah akan membutuhkan biaya khusus, sehingga jika tidak masuk dalam anggaran biaya maka hal inilah yang menjadi alasan utama dinas menempatkan peserta pada lokasi yang masih mudah dijangkau.

Hasil penelitian terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) program (PPG) tabel 9, (70%) diperoleh sangat kurang telah terjadi koordinasi antara pengelola program PPG di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) sebagai pengelola program PPG dengan dinas pendidikan setempat baik dari tahap sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan program monitoring dan evaluasi.

Koordinasi sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi terjadi melalui surat dengan komunikasi telepon dari pengelola maupun dosen yang bertugas melaksanakan monev. Koordinasi saat pelaksanaan yakni dosen yang bertugas melaksanakan monev setelah tiba di daerah langsung mengadakan pertemuan dengan dinas dan membicarakan hal teknis terkait pelaksanaan monev. Selama pelaksanaan monev dinas mendampingi. Setelah selesai pelaksanaan monev terjadi koordinasi lagi antara dinas dengan dosen yang bertugas melaksanakan monev. Biasanya hal yang dibicarakan adalah terkait hasil monitoring dan evaluasi.

Hasil penelitian terkait upaya yang dilakukan dinas pendidikan terkait tahapan persiapan dan pelaksanaan seperti yang tertuang dalam tabel 10, (70%) menunjukkan bahwa pada tahapan persiapan program PPG dinas pendidikan sangat kurang mengadakan upaya untuk mengatasi permasalahan pada tahap ini, karena pada tahapan ini mereka belum dilibatkan, akibatnya dinas tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk memaksimalkan tahap persiapan program PPG. Pada tahapan pelaksanaan program PPG upaya yang dilakukan dinas pendidikan daerah sasaran adalah berupaya berkoordinasi dengan para kepala sekolah dalam hal ini meminta bantuan kepala sekolah dalam hal mengatasi permasalahan mendistribusikan peserta.

Kepala sekolah berupaya menampung peserta yang sudah didistribusikan dinas ke sekolah mereka. Seperti diungkapkan oleh kepala sekolah, jika peserta yang didistribusikan disekolahnya sesuai dengan permintaan maka mereka merasakan bahwa permasalahan yang selama ini terjadi dapat teratasi. Permasalahan muncul ketika peserta yang didistribusikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Jika terjadi kondisi ini, maka kepala sekolah merasa direpotkan dengan adanya program ini, karena akan mengganggu jadwal mengajar guru yang sebenarnya.

Pengertian sumber daya manusia menurut Faustino Cardoso Gomes (2002) merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum, sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan atas dua macam, yakni (1) sumber daya manusia (*human resource*), dan (2) sumber daya non-manusia (*non-human resource*). Kelompok yang termasuk dalam sumber daya non-manusia antara lain modal, mesin, teknologi. Menurut pendapat ini sumberdaya manusia menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam suatu program.

Pengembangan SDM merupakan salah satu bentuk aktivitas dari manajemen sumber daya manusia, seperti dijelaskan oleh (Husaini Usman, 2008) bahwa pengembangan SDM merupakan bagian dari manajemen SDM. Pengembangan SDM ialah proses meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pengamalan agama, peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendidikan, peningkatan pelatihan, peningkatan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, pengendalian kependudukan, peningkatan lingkungan hidup, dan perencanaan karier. Melalui



program PPG termasuk dalam bagian peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan, namun hasil penelitian ternyata menunjukkan apa yang di lakukan selama ini masih membutuhkan pembenahan.

Hasil monitoring diperoleh bahwa pengelola program PPG tingkat pusat maupun di tingkat propinsi yakni pengelola PPG di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) terkait, belum memasukkan unsur evaluasi program terkait peningkatan kompetensi siswa dan pemecahan permasalahan sekolah setelah program PPG berjalan di suatu daerah. Hal ini terlihat dengan belum adanya instrumen untuk mengukur kompetensi dan permasalahan sebelum program PPG berjalan di daerah sasaran dengan setelah program PPG berjalan di daerah sasaran. Sampai saat ini belum diketahui siapa yang memiliki kewenangan melaksanakan hal ini, padahal tahapan ini merupakan bagian untuk evaluasi efektif tidaknya program PPG yang selama ini teudilah berjalan untuk memecahkan permasalahan pendidikan di daerah sasaran.

Hasil monitoring diperoleh juga bahwa ternyata jika dinas pendidikan tidak memiliki pemahaman yang baik dan tidak ada koordinasi mulai dari tahapan awal yakni penyusunan program PPG maka, implementasi di lapangan akan menghadapi beberapa kendala misalnya dinas pendidikan memandang bahwa program PPG merupakan program pusat dan mereka hanya terlibat dalam mendistribusikan peserta. Akibatnya, dalam pengalokasian anggaran oleh dinas untuk program ini tidak terjadi. Padahal kalau ditinjau secara mendasar justru program pelaksanaan di lapangan sudah banyak melibatkan dinas-dinas pendidikan daerah sasaran. Karakteristik daerah sasaran berbeda-beda misalnya di Propinsi Kalimantan Timur dan utara harus melewati perjalanan yang ditempuh lebih dari 1 hari dengan moda transportasi bisa lebih dari satu jenis. Jika tidak ada koordinasi yang baik antara pusat dengan daerah maka hal ini dapat menjadi kendala dalam pencapaian tujuan program PPG.

Zubaedi (2007) menyatakan bahwa manajemen bahwa desain manajemen esensial manajemen pendidikan berbasis masyarakat meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengawasan dan pengembangan yang terus-menerus melalui budgeting dan evaluasi. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa manajemen pendidikan yang baik melalui tahapan-tahapan manajemen yang benar sehingga tujuan suatu program pendidikan dapat dicapai. Pendapat ini bertentangan dengan yang terjadi melalui program pendidikan PPG, dimana tahapan-tahapan manajemen tidak sepenuhnya dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dengan program PPG

Ada keengganan dinas untuk menempatkan peserta di daerah yang sulit dan jauh karena tidak ada alokasi biaya untuk menjangkau daerah tersebut misalnya untuk di kabupaten Kutai Barat lokasi kecamatan yang ada di perbatasan yakni Long Apari dan Long Pahangai dua kecamatan ini merupakan daerah yang masuk dalam kriteria 3T dan langsung berbatasan dengan Negara Malaysia tepatnya daerah

Kucing. Diperlukan waktu lebih dari sehari untuk menjangkau daerah ini dan menggunakan moda transportasi pesawat dan long boat sehingga membutuhkan biaya yang banyak. Di Kabupaten Nunukan daerah 3T terdapat di kecamatan Kerayan, Lumbis dan Sebakung. Masa tunggu peserta SM3T untuk sampai ke lokasi-lokasi tersebut minimal 2 minggu karena harus menunggu jadwal penerbangan pesawat, tentunya hal ini membawa konsekuensi pada ekstra biaya. Hal ini perlu dikoordinasikan dengan dinas sehingga terjadi kesepahaman dalam hal merencanakan dalam pembiayaan baik oleh pusat maupun oleh dinas.

Beberapa usulan dinas pendidikan untuk perbaikan program PPG adalah terfokus pada tahap persiapan dinas pendidikan telah dilibatkan sehingga peserta disesuaikan dengan kuota dan kebutuhan daerah, karakteristik jangkauan geografis peserta diketahui dengan baik, gender dan agama yang dibutuhkan daerah, masa tunggu ke lokasi oleh peserta dari dinas kabupaten ke lokasi sasaran, pada tahapan monitoring dan evaluasi dinas dilibatkan saat pelaksanaan, karena yang terjadi selama ini pelaksana monev hanya melapor saat tiba kemudian melaksanakan kunjungan ke lokasi dan pamit saat selesai melaksanakan monev, jadi dinas tidak pernah diberitahu tentang kendala dan capaian pelaksanaan program PPG.

Hasil monitoring dan evaluasi sebenarnya sudah diketahui bahwa ada ketidaksesuaian antara kompetensi peserta dengan penempatan di sekolah, dan ada ketidaksesuaian antara penempatan pada lokasi yakni tidak memenuhi daerah 3T. Namun karena program ini telah berjalan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program PPG, agar benar-benar dapat mengatasi permasalahan daerah tertinggal terluar dan terdepan (3T) yang sesuai dengan misi pelaksanaannya yakni maju bersama mencardaskan bangsa Indonesia. Berdasarkan hal inilah maka fokus penelitian tahun ke dua adalah mengembangkan disain manajemen pengelolaan program PPG daerah 3T di wilayah Propinsi Kalimantan Utara yakni Kabupaten Nunukan dan Propinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Kutai Barat.

Program pendidikan profesi guru merupakan bagian dari manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Rue & Byars (2000) adalah: *"Management is a form of work that involves coordinating an organization's resources-land, labour, and capital to accomplish organizational objectives"*. Sebuah bentuk manajemen yang melibatkan koordinasi wilayah sumber daya organisasi, tenaga kerja, dan modal merupakan sasaran pemenuhan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya Hasibuan, M. S (2003) juga mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pendidikan profesi guru (PPG) salah satu tujuannya untuk berlatih sehingga kelak dapat menjadi guru profesional. Lebih lanjut, Beebe *et al.* (2000) mengemukakan: *"training is the process of*



developing skill in order to more effectively perform a specific job or task". Pelatihan merupakan proses untuk mengembangkan keterampilan secara efektif untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang spesifik. Kaitannya dalam hal ini Soekidjo Notoatmodjo (1998: 95) mengemukakan bahwa pelatihan terhadap pegawai mencakup: (1) pelatihan untuk melaksanakan program-program yang baru, (2) pelatihan untuk menggunakan alat-alat/fasilitas yang baru, (3) pelatihan untuk pegawai yang akan menduduki *job* atau tugas-tugas yang baru, (4) pelatihan untuk pengenalan proses atau prosedur kerja yang baru, dan (5) pelatihan bagi pegawai-pegawai yang baru.

Konsep pengembangan profesionalisme menurut para ahli dapat didefinisikan bermacam-macam. Salah satu pendapat dikemukakan oleh Alba, G.D & Sandberg (2006) sebagai berikut. *The concept of professional development is not clearly delimited. A profession traditionally is defined as being based on systematic, scientific knowledge. Preliminary development of professional skill has occurred largely through designated higher education programs, with subsequent development taking various forms.* Konsep pengembangan profesional tidaklah dengan jelas dibatasi. Suatu profesi digambarkan sebagai dasar pengetahuan sistematis dan pengetahuan ilmiah. Pengembangan ketrampilan profesional telah dirancang luas melalui program-program pendidikan lebih tinggi dengan berbagai bentuk pengembangan Islah Ahmad, (2014).

Pengembangan profesionalisme guru menurut The State of Queensland (2006), (*Department of Education, Training and the Arts*) adalah: *The Professional Development and Leadership Institute has been established in recognition that professional development is fundamental to the professional practice of teachers, to ensure that students benefit from dynamic and futures-oriented professional development experiences. Support for ongoing teacher professional development is central to quality schooling and promoting professionalism and a sense of scholarship within the teaching community. Both forms of professional development play important and independent roles in improving school organisational capacity and in enhancing teacher capital. Taken together, study findings on professional development and individual teacher capital suggest that a systemic focus on increasing individual teacher capital through professional development will improve schools' organisational capacity to deliver improved student outcomes.*

Pengembangan profesional adalah dasar dari praktek profesional guru untuk memastikan bahwa para siswa bermanfaat secara dinamis dan berorientasi pada pengalaman profesionalisasi masa depan. Dukungan pengembangan profesional guru yang berkelanjutan adalah terpusat pada kualitas sekolah dan mempromosikan profesionalisme serta pemberian penghargaan dalam lingkungan mengajar. Kedua bentuk pengembangan profesional berperan penting dalam meningkatkan kapasitas organisasi sekolah dalam meningkatkan kualitas guru. Studi penemuan

pada pengembangan profesional dan peningkatan guru secara individu menyatakan bahwa sebuah sistem memusat dalam meningkatkan kualitas guru secara individu melalui pengembangan profesional akan meningkatkan mutu organisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas lulusan siswa.

5. SIMPULAN

Setelah selesai mengadakan penelitian tahun pertama dan mengacu pada permasalahan serta tujuan maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T) wilayah propinsi kalimantan utara dan timur dalam mengimplementasikan program pendidikan profesi guru (PPG) adalah terjadi pada tahap persiapan dan tahapan pelaksanaan program PPG. kendala tahapan persiapan terjadi akibat tidak atau kurang terjadi sosialisasi dan koordinasi pada tahapan persiapan antara pusat dan daerah yakni sosialisasi program, koordinasi tahapan seleksi, dan koordinasi program (persiapan penyusunan program, menyusun program, setelah program tersusun). akibat kurang sosialisasi pada tahapan persiapan maka terjadi permasalahan pada tahapan pelaksanaan yakni kompetensi peserta tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, peserta tidak terampil memecahkan permasalahan daerah, kurang meningkatkan kompetensi peserta.
- b. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T) wilayah propinsi kalimantan utara dan timur dalam mengimplemenasikan program pendidikan profesi guru (PPG) pada tahapan persiapan berada pada kategori sangat kurang karena dinas tidak terlibat pada tahapan ini. tahapan pelaksanaan juga kurang karena dinas tidak dilibatkan pada tahapan persiapan, sehingga dinas pendidikan merasa mereka tinggal menjalankan program yang sudah jadi

6. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan maka terdapat beberapa saran agar pelaksanaan program pendidikan profesi guru benar-benar menghasilkan calon guru yang berdedikasi dan profesional. adapun saran sebagai berikut:

- a. koordinasi antara pengelola program pendidikan profesi guru di tingkat pusat sebaiknya berkoordinasi dengan dinas pendidikan daerah sasaran mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan agar memperoleh gambaran yang nyata terkait kebutuhan daerah, sehingga program ppg benar-benar menghasilkan calon guru yang berdedikasi dan profesional.
- b. perlu melakukan perbaikan manajemen program ppg yang berbasis pada kebutuhan daerah

7. DAFTAR PUSTAKA

- Beede.2000, *The Legal Sources Of Public Policy*, Lexington Books D.C. Heath And Company, Lexington Massachusetts Toronto
- Byars and Rue, 2000. *Human Resource Management: A Practical Approach*, Harcourt Brace, New York
- Depdiknas. 2015. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
- Faustin Cardoso, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2003. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta : Pt Toko Gunung Agung.
- Husaini, U.. (2008). *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Islah Ahmad. 2014 . *Desain Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Tengah Era Desentralisasi*.
https://www.academia.edu/3653866/Desain_Manajemen_PendidikanBebasis_Masyarakat_Di_Tengah_Era_Desentralisasi Di Akses Pada Tanggal 19 Oktober 2015
- Noe, Raymond A. 2003. *Human Resources Management: Gaining A Competitive Advantage*, 4th Edition, Mcgraw-Hill/Irwin, New York
- Sandberg, A., 2006. Cognitive Enhancements: Methods, Ethics, Regulatory Challenges. *Sci Eng Ethics* (2009), 15: 311-341
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Cv. Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Zubaedi. (2007). *Pendidikan Berbasis Masyarakat* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Pemberi saran:

Tenggarudin, Univeritas Halu Uleo Kendari

Saran:

- Kurangnya kemampuan SDM di daerah untuk pengelolaan PPG → Kurikulum, Standar Penilaian
- Pemerintah tidak memahami
- Perlunya rekomendasi

Tanggapan:

Hal inilah yang perlu dibenahi melalui penyusunan desain manajemen pengelolaan untuk memperoleh desain manajemen yang baik untuk mengelola program PPG di daerah 3T di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Nunukan di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pemberi saran:

Slamet, Universitas Malang

Saran:

Apresiasi penelitian yang dilakukan di daerah 3T

Tanggapan:

Benar dan terimakasih karena daerah 3T memiliki karakteristik tersendiri, terutama terkait pengelolaan PPG di daerah tersebut memiliki kendala dan permasalahan tersendiri..

